

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini isu mengenai pelayanan publik menjadi sorotan sebab sampai saat ini masyarakat belum merasakan hasil yang baik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan penilaian kinerja pelayanan publik. Hasil kinerja yang baik merupakan perwujudan dari konsep otonomi daerah. Otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia bersifat nyata, luas serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Otonomi daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari pemberian hak dan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Tugas dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, menegakkan keadilan serta memelihara hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, perlu adanya batasan kewenangan bagi daerah dalam mengatur rumah tangganya sehingga daerah memiliki kebebasan dalam menggunakan potensi yang dimilikinya.

Di Indonesia otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi, pada tahun 2004 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun kemudian, Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, maka secara yuridis keberadaan perangkat daerah mengalami perubahan yakni pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan status Kelurahan yang sebelumnya sebagai perangkat daerah menjadi perangkat Kecamatan sehingga lurah bertanggungjawab kepada Camat dan bukan lagi kepada Walikota/bupati, maka hubungan Kelurahan dan Kecamatan bersifat hierarki. Dengan adanya perubahan tersebut maka berdampak juga terhadap anggaran Kelurahan yang semula anggarannya terpisah dari pemerintah daerah sekarang menjadi satu bagian dari Kecamatan sehingga anggaran Kelurahan masih termasuk APBD berbeda dengan desa yang anggarannya bersifat otonom yaitu dari APBDes.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa Dana Kelurahan disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan yang merupakan suntikan dana bagi kelurahan di kabupaten/kota yang bertujuan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Daerah Kabupaten/Kota yang berkategori baik menerima DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp 350.000.000,00. Untuk kategori perlu ditingkatkan sebesar Rp 366.000.000,00 sedangkan untuk kategori sangat perlu ditingkatkan sebesar Rp 381.819.000,00.

Dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalata Provisini Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari pagu indikatif kewilayahan yang merupakan alokasi anggaran 5% dari APBD tahun 2020 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 68.934.124.000,00 dan DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD 2020 sebesar Rp 25.254.000.000,00.

Dengan ditetapkannya DAU tambahan tersebut, perlu dilakukannya pengawasan terhadap pelayanan publik agar dana tersebut disalurkan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk tim khusus pengawasan guna untuk memastikan penggunaan keuangan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik akan mampu meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kelurahan. Maka dari itu, untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang baik diperlukan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang baik pula agar kinerja pelayanan publik memiliki kualitas yang baik.

Moeheriono (2012:95) menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran dari pencapaian suatu organisasi terhadap program atau kegiatan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasinya dengan menggunakan rencana strategis yang telah dibuat. Pelayanan publik pemerintahan kelurahan fokus kepada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat, yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan.

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik merupakan pencapaian pemerintah dalam melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta melakukan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 3 ayat (1) bahwa “Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat”. Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri”. Maka dari itu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sangat perlu diterapkan dalam kegiatan pelayanan publik sehingga terwujudnya kinerja pelayanan publik yang semakin baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada BAB III menjelaskan bahwa partisipasi, akuntabilitas dan transparansi termasuk prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator kinerja pelayanan publik.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa : “Transparansi adalah akses yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam rangka memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dari mulai proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengadilan.”

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap proses mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengadilan harus diinformasikan kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut, maka akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran serta masukan sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bentuk semangat dari penerapan prinsip *Good Governance*. Dengan adanya prinsip transparansi yang berupa penyediaan informasi serta terjaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Selain transparansi, akuntabilitas juga akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik pemerintah kelurahan, karena pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Transparansi dan akuntabilitas sangat berhubungan karena dengan adanya transparansi atau keterbukaan informasi maka jika dalam informasi tersebut terdapat kesalahan maka harus dipertanggungjawabkan.

Mardiasmo (2017:20) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan atas segala aktivitas yang telah dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewajiban kepada

pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas yang dimaksud dalam pemerintahan kelurahan adalah bagaimana pemerintah kelurahan dapat mempertanggungjawabkan wewenang dan kewajiban pemerintah kelurahan dalam menjalankan perencanaan dan pelaksanaan finansial untuk pelayanan publik. Penerapan akuntabilitas yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang mencerminkan kepentingan dan sesuai dengan harapan masyarakat daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Sehingga semakin tinggi dan semakin baik akuntabilitas di suatu entitas organisasi pemerintah maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pelayanan publik pemerintah kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik pemerintah kelurahan, tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Solekhan (2014:141) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu kelurahan dalam mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan pembangunan sehingga meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah kelurahan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Penyelenggaraan dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik”.

Maka dari itu, peran transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam melakukan pelayanan publik agar kinerja pelayanan publik dapat terus meningkat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di kelurahan tentunya tidak terlepas dari dana yang tersedia. Dana yang digunakan pemerintah kelurahan dalam mempercepat pembangunan yaitu, dana alokasi umum tambahan yang bersumber dari APBN. Berikut tabel jumlah DAU Kota Tasikmalaya :

Tabel 1. 1 Jumlah DAU Kota Tasikmalaya

Tahun	Jumlah DAU Formula	Jumlah DAU Tambahan	Jumlah DAU Total
2019	Rp. 803.892.912.000	Rp. 25.539.522.000	Rp. 829.431.434.000
2020	Rp. 728.062.752.000	Rp. 30.998.402.000	Rp. 759.061.154.000

Sumber: djp.kemenkeu.go.id, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi dana kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat sehingga menunjukkan perubahan yang positif karena dengan meningkatnya dana kelurahan maka pembangunan dan kesejahteraan setiap kelurahan akan menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya DAU Tambahan tersebut maka pemerintah kelurahan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan khususnya dalam mengelola keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan pada masyarakat agar kinerja pelayanan publik pemerintah kelurahan semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Namun, Kelurahan di Tasikmalaya pada saat ini sedang digemparkan oleh informasi dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITNGDA) Kota Tasikmalaya pada website Times Indonesia Kamis 21 Januari 2021, bahwa APBD tahun 2022 diprediksikan akan menurun. Karena, Dana Alokasi Umum Tambahan akan dihapus. Sedangkan setiap program kegiatan memerlukan biaya yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut bisa dilihat dari realisasi anggaran MUSRENBANG tahun 2021 sejumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 sedangkan tahun ini usulan anggaran sebesar Rp 754.000.000,00. Dengan adanya informasi mengenai penghapusan DAU Tambahan menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja pelayanan publik pemerintah kelurahan pada tahun 2021 apakah dalam pengelolaan keuangan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipasi serta apakah dana yang tersedia telah disalurkan sesuai dengan ketentuannya yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Purbaratu merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Tasikmalaya yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Cibeureum. Berdasarkan informasi dari Ketua RW 01 Singkup pada website Media TINDAK pada 14 Juli 2020 bahwa peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi drainase di Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dalam pengerjaannya asal-asalan karena bahan material yang belum kunjung datang, padahal dana anggaran yang disalurkan pemerintah dari DAU Tambahan senilai Rp 41.700.000.

Maka dari itu pemerintahan Kecamatan Purbaratu perlu diamati apakah sudah menerapkan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan dana kelurahan dan pelayanan publiknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan, adapun penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lucy Auditya, Husaini dan Lismawati (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Bengkulu.
2. Hari Eka Setiawan dan Muhammad Safri (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah” di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah jika diregresikan bersama akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, dan akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh secara signifikan.
3. Ni Luh Putu Uttari Premananda dan Ni Made Yenni Latrini (2017) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah” di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, serta anggaran

memberikan pengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun simultan pada kinerja Pemerintah Kota Denpasar.

4. Evi Damayanti dan Suwardi Bambang Hermanto (2018) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah” di SKPD Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah.
5. Anita Firdaus, Suharno dan Sunarti (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa” di desa Sidoharjo Kec Sidoharjo Kab. Sragen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
6. Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2015) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari (2018) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat Desa” di Desa Tulungrejo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat.

8. Intan Sengaji dan Nur Fadjrih Asyik (2018) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa terhadap Pembangunan Desa” di desa Waiburak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Desa, sedangkan Kebijakan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa.
9. Siti Umaira dan Adnan (2019) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” di Kab. Aceh Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
10. Risca Syafira Angelia dan Sri Rahayu (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa” di Kecamatan Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan

akuntabilitas serta partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

11. Mayangsari Putri, Suharno dan Bambang Widarno (2018) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa” di Desa Majenang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
12. Fanny Jitmau, Lintje Kalangi dan Linda Lambey (2017) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Interen terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, transparansi dan fungsi pemeriksaan interen berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
13. Filda Gean Rosiana Dewi (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan” di desa Dahanrejo Kec Kebomas Kab. Gresik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan, sedangkan akuntabilitas alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan.
14. Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo (2016) dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” di desa Bomo Kec. Rogojampi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara keseluruhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana

desa di desa Bomo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, tetapi masih memerlukan pendamping dari aparat pemerintah daerah dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia.

15. Emilianus Jaa, Sulistyono dan Supami Wahyu Sulistyowati (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa” di desa Gurung Turi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa.
16. Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah dan Diandra Pepi Vebian (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja instansi pemerintah.
17. Chifniyatul Ulya dan Ernawati Budi Astuti (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah” di BPKAD Kab. Tegal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
18. Risyia Umami dan Idang Nurodin (2017) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa” di Kec. Surade. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh pada Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi

dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan dan parsial pada Pengelolaan Keuangan Desa.

19. Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa” di Pemerintah Desa di Kab. Garut. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
20. Dito Aditia Darma Nasution (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah” di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan transparansi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kemudian secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.
21. Renita Kushartiningsih dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik.

Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka untuk melihat persamaan dan perbedaan di penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Lucy Auditya, Husaini dan Lismawati 2013 Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu	• Variabel Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian Sekarang : Terdapat Partisipasi Masyarakat Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah	Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013: 21-24 ISSN 2303-0348
2.	Hari Eka Setiawan, Muhammad Safri 2016 Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner • Metode Analisis : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	• Variabel Penelitian : Pengawasan dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah • Variabel Penelitian Sekarang : Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah jika diregresikan bersama akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, dan akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh secara signifikan	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online)

			• Tempat Penelitian		
3.	Ni Luh Putu Uttari Premananda, Ni Made Yenni Latrini 2017 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Partisipasi Anggaran dan Kinerja Anggaran • Variabel Penelitian Sekarang : Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi anggaran memberikan pengaruh secara signifikan baik secara pasial maupun simultan pada kinerja Pemerintah Kota	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 18.3. Maret (2017): 2451-2476 ISSN:2302-85564
4.	Evi Damayanti, Suwardi Bambang Hermanto 2018 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Pengendalian Internal • Variabel Penelitian Sekarang : Partisipasi Masyarakat • Teknik Analisis Data :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol 7, Nomor 3, Maret 2018 e-ISSN: 2460-0585

			Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian		
5.	Anita Firdaus Suharno, Sunarti 2020 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (di Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab. Sragen).	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Pengelolaan Alokasi Dana Desa • Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah • Teknik Analisis Data : Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelohan alokasi dana desa.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Infomasi Vol. 15 No. 3 2020
6	Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha dan Nyoman Ari Surya Darmawan 2015 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah,	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah • Teknik	• Variabel Penelitian Sekarang : Tidak terdapat variabel Pengawasan Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan	e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol. 3 No. 1 Tahun 2015)

	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Buleleng	Pengumpulan Data : Kuesioner	• Teknik Analisis Data : Regresi Linear Berganda sedangkan penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	
7.	Yohanes Antonius Lasa, Asih Widi Lestari 2018 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat Desa (di Desa Tulungrejo)	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulungrejo	JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 7, No. 1 (2018)
8.	Intan Sengaji, Nur Fadjrih Asyik 2018 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa (di Desa Waiburak)	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas • Variabel Penelitian Sekarang : Akuntabilitas • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Kebijakan Desa dan Pembangunan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa sedangkan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 7 No. 3 Maret 2018 e-ISSN: 2460-0585

			• Variabel Penelitian Sekarang : Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	pembangunan desa.	
9	Siti Umaira dan Adnan 2019 Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Kab. Aceh Barat Daya)	• Variabel Penelitian : Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Kompetensi Sumber Daya Masyarakat, Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa • Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat , kompetensi SDM dan pengawasan berpengaruh secara bersama – sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat, kompetensi SDM dan pengawasan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4 No. 3 (2019) Hal 471-481

			sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)		
			• Tempat Penelitian		
10	Risca Syafira Angelia dan Sri Rahayu 2019 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Cianjur	• Variabel Penelitian : Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Pengelolaan Keuangan • Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Regresi Linier Berganda sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas serta partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Jurnal e-Proceeding of Management : Vol. 7 No. 1 April 2019, ISSN : 2355-9357
11	Mayangsari Putri, Suharno, Bambang Widarno 2018 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa	• Variabel Penelitian: Transparansi Akuntabilitas dan Kinerja Pemerinah Desa • Teknik Pengumpulan	• Variabel Penelitian : Pengawasan Keuangan Desa • Variabel Sekarang : Partisipasi Masyarakat dan Kinerja	Hasil penelitian tersebut menunjukan Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 1 2018

	(Studi kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen)	Data Kuesioner :	Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian		
12	Fanny Jitmau, Lintje Kalangi dan Linda Lambey 2017 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong)	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Fungsi Pemeriksaan Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah • Variabel Penelitian Sekarang : Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang Analisis Jalur (<i>Path</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan fungsi pemeriksaan internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" Vol. 8 No. 1 (2017) eISSN 2715-1859

			<i>Analysis)</i>		
			• Tempat Penelitian		
13	Filda Gean Rosiana Dewi 2020 Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan (di Desa Dahanrejo Kec. Kebonmas Kab. Gresik)	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Teknik • Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Kebijakan Desa dan Pembangunan • Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan, sedangkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol 9 No 5 Mei 2020 e-ISSN : 2460-0585
13	Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo 2016 Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (di Desa Bomo Kec. Rogojampi)	• Variabel Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas	• Variabel Penelitian : Pengelolaan Dana Desa • Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bomo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip yang berlaku, tetapi masih memerlukan pendamping dari aparat pemerintah daerah dalam hal pertanggungjawaban	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 5 No. 11 November 2016 ISSN : 2460-0585

			• Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan dokumenter sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan kuesioner • Teknik Analisis Data : Regresi Linear Berganda sedangkan penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia.	
15	Emilianus Jaa, Sulistyو dan Supami Wahyu Sulistyowati 2019 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Desa Gurung Turi Kab. Manggarai)	• Variabel Penelitian : Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pembangunan Desa • Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Vol. 7 No. 1 April 2019 ISSN 2337-5663

			• Tempat Penelitian		
16	Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vebian 2019 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (pada SKPD Kabupaten Bandung Barat).	• Variabel Penelitian : Transparansi Akuntabilitas • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian Sekarang : Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja instansi pemerintah.	Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Widyatama Vol. 10 No. 1 Maret 2019
17	Chifniyatul Ulya dan Ernawati Budi Astuti 2018 Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab. Tegal, Camat dan Lurah Kab. Tegal)	• Variabel Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Kinerja Organisasi Perangkat Daerah • Variabel Penelitian Sekarang : Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2 2018 E-ISSN : 2613-9170 ISSN : 1907-4433

			sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian		
18	Risya Umami dan Idang Nurodin 2017 Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Kec. Surade Desa Jagamukri Gunungsungging Cipeundeuy dan Sukatani)	• Variabel Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Pengelolaan Keuangan Desa • Variabel Penelitian Sekarang : Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa baik secara simultan maupun parsial.	Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 6 Edisi 11 2017 ISSN : 20886969
19	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani 2019 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Pemerintah Desa di Kab. Garut)	• Variabel Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian : Pengelolaan Keuangan Desa • Variabel Penelitian Sekarang : Terdapat Partisipasi	Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh	Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM ISSN : 2654-5446 E-ISSN : 2655-3821

			Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linear Berganda • Tempat Penelitian	terhadap pengelolaan keuangan desa	
20	Dito Aditia Darma Nasution 2018 Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi • Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	• Variabel Penelitian Sekarang terdapat : Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan • Teknik Analisis Data : Analisis Regresi Linear Berganda Sedangkan sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan transparansi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kemudian secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah	Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 3, 2018 Hal 149-162 ISSN : 2597-7601
21	Renita Kushatiningsih dan Ikhsan Budi Riharjo (2021) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	• Variabel Penelitian : Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pelayanan Publik • Teknik Pengumpulan Data :	• Variabel Penelitian Sekarang : Terdapat Partisipasi Masyarakat • Teknik Analisis Data : Analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 10 No, 3, Maret 2021 e-ISSN : 2460-0585

		Kuesioner	Regresi Linear Berganda Sedangkan sekarang menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) • Tempat Penelitian		
--	--	-----------	--	--	--

Sumber: Jurnal

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud membuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan” (Sensus Pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Tahun 2021).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pokok yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan dan Partisipasi masyarakat, dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan secara parsial baik langsung maupun tidak langsung pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi masyarakat secara simultan terhadap Kinerja

Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data dan menyimpulkan serta mengetahui :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat, dan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan secara parsial baik langsung maupun tidak langsung pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;
3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan dan Partisipasi masyarakat secara simultan terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berfikir, sehingga dapat menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman khususnya mengenai

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kelurahan.

2. Bagi Pihak Kelurahan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pentingnya transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik pemerintah kelurahan di Kecamatan Purbaratu demi kemajuan daerah.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang sekiranya mampu memberikan manfaat sebagai bahan pembanding dan petunjuk untuk penelitian pada masalah yang sama atau penelitian selanjutnya.

4. Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini dapat memperkaya perbendaharaan di perpustakaan Universitas Siliwangi sekaligus bahan pembanding bagi rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan serupa dimasa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 6 kelurahan yang berada di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan mengolah data/informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis melaksanakan penelitian dengan pendekatan sensus di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Jawa Barat selama 7 bulan yaitu dari Bulan September 2021 sampai dengan Maret 2022 yang terlampir pada (lampiran 1).